



29 OCT 2021

PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI DINAS PENANAMAN MODAL & PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Alamat : Jalan Perseilan Raya No. 116, Kecamatan Beringin Kukupan Singkai Tepian (0482)210699 Fax: (0482)22450 Kode Post: 192012 Kapukutan Singkai

DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SINJAI
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL

NOMOR : 151021/05/DPM-PTSPX/2021

ASI
IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

"KELOMPOK BERMAIN BUNDA APARENG"
DESA BARAMBANG, KECAMATAN SINJAI BORONG

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SINJAI,

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum kepada penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dalam memberikan layanan pendidikan kepada Masyarakat perlu diberikan Izin Pendidikan dan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
- b. bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Sinjai Nomor : 421.9/13.794/DPOPR/2016 tentang Perpanjangan Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini " KELOMPOK BERMAIN BUNDA APARENG" Desa Barambang Kecamatan Sinjai Borong telah berakhir masa berlakunya sejak tanggal 25 Mei 2017, maka perlu diterbitkan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang baru;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana maksud huruf a dan huruf b, dipandang perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sinjai tentang izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) "KELOMPOK BERMAIN BUNDA APARENG" Barambang, Kecamatan Sinjai Borong;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

GRATIS

ASLI

7.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

8. Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayaran Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanaan Perizinan Terpadu di Daerah;

13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelegaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);

16. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2014 tentang Penyelegaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2014 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 74);

17. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sinjai (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 93);

18. Peraturan Bupati Sinjai Nomor 23 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2018 Nomor 23);

19. Peraturan Bupati Sinjai Nomor 50 Tahun 2019 tentang Pendeklegasian Kewenangan Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sinjai (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2019 Nomor 50);

ASLI

Horor : 15/02/2021/DPMP150/00024
Halaman : 3 (3)

Memperhatikan

1. Permohonan Penanggung Jawab KELOMPOK BERMAIN BUNDA APARENG Nomor :02/KH-BAV/II/SB/2021, Tanggal 06 Maret 2021 Perihal Permohonan Perpanjangan Penerbitan Izin Operasional Penyelenggaraan KB;
2. Akta Notaris Nomor : 97 Tanggal 27 Desember 2011 tentang Pendekatan Anak Usia Dini Bunda Apareng Disingkat PAUD BUNDA APARENG;
3. Rekomendasi Teknis Dinas Pendidikan Kabupaten Sinjai, Nomor : TR/89/DP, Tanggal 27 Oktober 2021, Perihal Rekomendasi Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan yang baru;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Kepada :

Nama lembaga : KELOMPOK BERMAIN BUNDA APARENG
Alamat Lembaga : Dusun Bonto Manai, Desa Barambang, Kec. Sinjai Boro
Penanggung Jawab : IRWANDI

- Kedua : Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sebagaimana dimaksud pada DLKTUM KESATU, berlaku sejak tanggal 25 2021 sampai dengan 25 Mei 2024;
- Ketiga : Permohonan Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia (PAUD), diajukan 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa berlaku izin; Keempat : Keputusan Kepala Dinas ini dipergunakan sebagaimana mestinya, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Diterbitkan di Kabupaten Sinjai
Pada tanggal : 28 Oktober 2021

a.n. BUPATI SINJAI
KEPALA DINAS,



LUKMAN DAHLAN, S.I.P, M.Si

Pangkat : Pembina Utama Muda / Mc

NIP : 197011301990031002

Iembusan:

1. Bupati Sinjai di Sinjai (Sebagai Laporan);
2. Kepala Dinas Pendidikan di Sinjai;
3. Camat Sinjai Borong;
4. Arsip.